

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Herwyn J. H. Malonda

Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Abhan

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Abhan

Manado , 29 Januari 2021

Pihak Pertama,



Dr. Herwyn J. H. Malonda

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	84.69	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	90.65	Nilai	Daftar Indeks Demokrasi Indonesia
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	1. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Penilaian oleh pihak ke-3.
		2. Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi,	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	Skala	Berdasarkan Perpres 95 tahun 2018

	efektif, transparan, dan aksesibel				tentang SPBE, Permenpan RB No.5 Tahun 2018
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB

Kegiatan :	Anggaran :
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Lembaga Ad-Hoc	Rp 36,695,957,000 ,-

Pihak Kedua,

Abhan

Manado, 29 Januari 2021

Pihak Pertama,

Dr. Herwyn J. H. Malonda

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldrin Arthur Christian S.STP

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Dr. Herwyn J. H. Malonda

Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

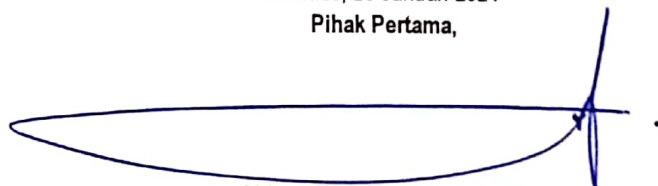
Pihak Kedua,



Dr. Herwyn J. H. Malonda

Manado, 29 Januari 2021

Pihak Pertama,



Aldrin Arthur Christian, S.STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga pengawas pemilu Ad-hoc	1. Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting (PN)	1	Daerah	-
		2. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	Persen	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dikali 100
		3. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	Persen	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuai kebutuhan dibagi pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan.

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN	FORMULA
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas pemilu <i>Ad-hoc</i>	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	80	Persen	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dengan dana hibah yang dilaksanakan sesuai dengan standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dibagi Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota dengan dana hibah yang tersedia x 100

Sasaran Kegiatan :		Anggaran :	
1.	Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset	Rp	302,143,000 -
2.	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota serta Lembaga Ad-Hoc	Rp	36,695,957,000,-

Pihak Kedua,

Dr. Herwyn J. H. Malonda

Manado, 29 Januari 2021

Pihak Pertama,

Aldrin Arthur Christian S.STP



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Greity Tuturoong, S.Sos., MAP

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Adrin Arthur Christian, S.STP

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Adrin Arthur Christian, S.STP)

Pihak Pertama,

(Greity Tuturoong, S.Sos., MAP)

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

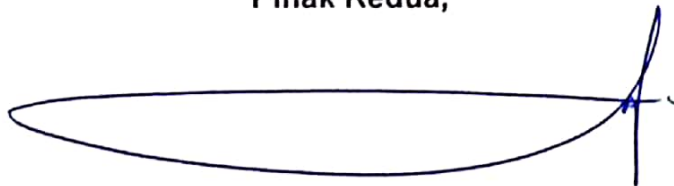
MISI	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
5	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Layanan Perencanaan Program dan Anggaran.	Jumlah Laporan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	2	Dokumen	Renstra dan Renja
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, BMN dan Ketatausahaan Kearsipan yang Akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	2	Laporan	RK-BMN
		Jumlah Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan yang diselenggarakan	2	Laporan Semester	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Sumber Daya manusia Pengawas dan Kesekretariatan yang Profesional.	Jumlah kegiatan Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	50	Orang	Jumlah orang yang mengikuti Diklat/Peningkatan Kapasitas
	Terwujudnya Sinergitas Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Melalui Kualitas Layanan Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	8	Dokumen	(LKIP, Perkin, SK-IKU, Rencana Aksi, Laporan per-triwulan)
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Layanan Administrasi Keuangan yang Akuntabel, Cepat dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	1	Laporan	Laporan Keuangan
	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Gaji, Tunjangan, dan Pemeliharaan Operasional Perkantoran) yang Tepat Waktu.	Jumlah Laporan Gaji Dan Tunjangan	12	Laporan Bulanan	
		Jumlah Laporan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Laporan Bulanan	

MISI	SASARAN KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
	PN	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	Laporan	Laporan Akhir
	HIBAH	Jumlah Laporan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan (Hibah)	1	Laporan	Laporan Akhir

Komponen Input :		Anggaran :	
1.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Rp	24.373.000
2.	Pembinaan dan Pengelolaan BMN	Rp	90.240.000
3.	Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan	Rp	15.000.000
4.	Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan	Rp	348.060.000
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program	Rp	41.820.000
6.	Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Rp	302.143.000
7.	Gaji dan Tunjangan	Rp	2,946,611,000
8.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp	2,506,271,000

Jakarta, 29 Januari 2021

Pihak Kedua,



(Adrin Arthur Christian, S.STP)

Pihak Pertama,



(Greity Tuturoong, S.Sos., MAP)



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanne Janis, S.H

**Jabatan : Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa
Proses Pemilu dan Hukum Provinsi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Aldrin Arthur Christian, S.STP

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Aldrin Arthur Christian, S.STP)

Pihak Pertama,

(Yanne Janis, S.H)

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021
KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESIAN SENGKETA PROSES PEMILU
DAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

MISI	SASARAN KOMPOMEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Kualitas Penanganan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan yang Transparan, Cepat dan Sederhana.	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	2	Laporan Semester	
		Jumlah Laporan Fasilitas Sentra Gakkumdu	2	Laporan Semester	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atau Pemilihan yang transparan, cepat dan sederhana.	Jumlah Laporan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	2	Laporan Semester	
	HIBAH	Jumlah Laporan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan (Hibah)	1	Laporan	Laporan Akhir
3	Meningkatnya kualitas Layanan Bantuan Hukum dan kajian hukum.	Jumlah Laporan Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	2	Laporan semester	
		Jumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	2	Laporan semester	
		Jumlah Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan sesuai SOP	2	Laporan semester	
4	HIBAH	Jumlah Laporan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan (Hibah)	1	Laporan	Laporan Akhir

1.	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran	Rp.	302,940,000
2.	Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan	Rp.	302,940,000
3.	Fasilitasi Sentra Gakkumdu	Rp.	74,060,000
4.	Advokasi Pelanggaran dan Pidana Pemilu/Pemilihan	Rp.	16,400,000
5.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum	Rp.	220,980,000
6.	Diseminasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp.	74,060,000

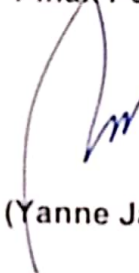
Jakarta, 29 Januari 2021

Pihak Kedua,



(Aldrin Arthur Christian, S.STP)

Pihak Pertama,



(Yanne Janis, S.H)



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anggray Sari Mokoginta,SP

**Jabatan : Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu
Provinsi Sulawesi Utara**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Aldrin Arthur Christian, S.STP

Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Januari 2021

Pihak Kedua,

(Aldrin Arthur Christian, S.STP)

Pihak Pertama,

(Anggray Sari Mokoginta,SP)

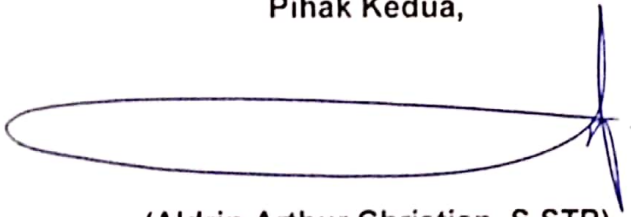
PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2021
KEPALA BAGIAN PENGAWASAN DAN HUMAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

MISI	SASARAN KOMPOMEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang sesuai dengan ketentuan	Jumlah Laporan Pengawasan Pemilu Partisipatif	2	Laporan Semester	
		Jumlah Laporan Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	2	Laporan Semester	
		Jumlah laporan Fasilitas, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	2	Laporan Semester	
		Jumlah Laporan Fasilitas, Koordinasi dan pelaporan Bawaslu Provinsi	2	Laporan Semester	
		Jumlah Laporan Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	2	Laporan Semester	
HIBAH	Jumlah Laporan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan (Hibah)	1	Laporan	Laporan Akhir	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan, pemberitaan dan publikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	2	Laporan semester	
	Terwujudnya Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi.	Jumlah Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	2	Laporan semester	
	HIBAH	Jumlah Laporan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan (Hibah)	1	Laporan	Laporan Akhir

Komponen Input :		Anggaran :	
1.	Pengawasan Pemilu Partisipatif	Rp.	74,060,000
2.	Pembinaan/Penyelenggaraan Pengawasan dan Supervisi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Rp	220,880,000
3.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pelaporan Bawaslu Provinsi	Rp.	968,280,000
4.	Evaluasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan	Rp.	37.300.000
5.	Pengelolaan Kehumasan, Peliputan dan Dokumentasi	Rp.	6,950,000
6.	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik	Rp.	6,950,000

Jakarta, 29 Januari 2021

Pihak Kedua,



(Aldrin Arthur Christian, S.STP)

Pihak Pertama,



(Anggray Sari Mokoginta, SP)